

**Limitasi Materi Muatan Pidana pada Peraturan Daerah dalam
Perspektif Undang-Undang 12 Tahun 2011
dan *Siyāsah Tasyrī'iyah***

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Iqbal Alif Auliadi

NIM. 05040421087



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Iqbal Alif Auliadi
NIM : 05040421087
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata negara
Judul : Limitasi Materi Muatan Pidana pada Peraturan Daerah
dalam Perspektif Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan
Siyāsah Tasyrī'iyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Mohammad Iqbal Alif Auliadi

NIM. 05040421087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Iqbal Alif Auliadi

NIM : 05040421087

Judul : Limitasi Materi Muatan Pidana pada Peraturan Daerah dalam
Perspektif Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan Siyāṣah
Tasyrī'iyah

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Februari 2025

Pembimbing,



Achmad Safudin R., M.H.

NIP.199212292019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

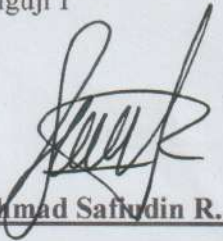
Nama : Mohammad Iqbal Alif Auliadi

NIM. : 05040421087

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

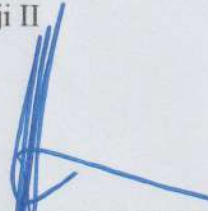
Penguji I



Achmad Safudin R., M.H.

NIP.199212292019031005

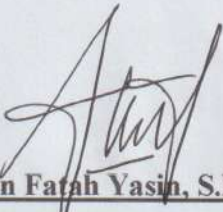
Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

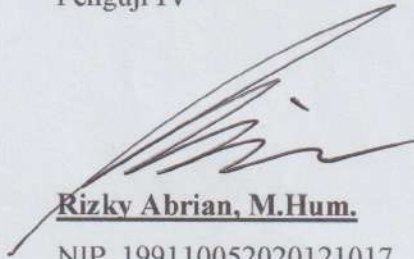
Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I. M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 17 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Iqbal Alif Auliadi
NIM : 05040421087
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : neneiqbal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Limitasi Materi Muatan Pidana pada Peraturan Daerah dalam Perspektif Undang-Undang 12

Tahun 2011 dan Siyāṣah Tasyrī'iyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Mei 2025

Penulis



(Mohammad Iqbal Alif Auliadi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerahnya sendiri. Peraturan Daerah yang juga telah diatur pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam Peraturan Daerah dapat dimuat sanksi pidana dan diberi batasan tertentu. Hal tersebut terdapat perdebatan terkait kewenangan dari DPRD dalam merumuskan ketentuan pidana karena kewenangan dari DPRD berbeda dengan DPR ditingkat pusat. Maka dengan demikian skripsi ini akan membahas beberapa rumusan masalah terkait limitasi materi muatan pidana pada Peraturan Daerah menurut Undang-Undang 12 dan juga *Siyāsah Tasyrī'iyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang membandingkan antara Undang-Undang 12 tahun 2011 (Indonesia) dan Local Autonomy Act (Korea Selatan). Penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum lainnya termasuk jurnal hukum, isu hukum dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan materi muatan pidana seharusnya hanya dilakukan oleh lembaga legilsatif yakni DPR. DPRD yang secara struktur kelembagaan dibawah lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah, seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam merumuskan materi muatan pidana dan Perumusan materi muatan pidana juga diharuskan berdasar pada kaidah-kaidah fiqhiyyah untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Lembaga Ahl al-Hall wa al-'Aqd serupa dengan DPR sebagai bentuk perwakilan rakyat ditingkat pusat. Maka dengan demikian menurut pandangan *Siyāsah Tasyrī'iyah*, seharusnya DPRD tidak diperkenankan untuk memuat sanksi pidana dikarenakan konsep perwakilan rakyat dalam Islam yakni Ahl al-Hall wa al-'Aqd juga hanya berada ditingkat pusat sama seperti DPR.

Penulis juga memberikan saran yaitu seharusnya kewenangan DPRD dalam merumuskan ketentuan pidana pada Peraturan Daerah dikaji kembali frasa dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah boleh memuat sanksi pidana namun diberi batasan tertentu.

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SIYĀSAH TASRĪ'IIYAH dan KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	22
A. <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i>	22
B. Kedaulatan Rakyat.....	28
C. Pembentukan Peraturan Daerah.....	37
BAB III MATERI MUATAN PIDANA PADA PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011	51

A. Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi Pidana.....	51
B. Implementasi Penerapan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah di Daerah .	61
C. Perbandingan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 (Indonesia) dan Local Autonomy Act (Korea Selatan)	64
BAB IV Analisis Kewenangan DPRD Merumuskan Materi Muatan Pidana dan Limitasi Materi Muatan Pidana pada Peraturan Daerah menurut <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	70
A. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Dalam Merumuskan Materi Muatan Pidana	70
B. Pembentukan Peraturan Daerah dalam perspektif <i>Siyasah Tasyrī'iyah</i>	76
C. Pembatasan Materi Muatan Pidana dalam Perda Menurut <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	96

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah	48
---	----



DAFTAR TABEL

Table 1 Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi Pidana	59
Table 2 Perbandingan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 (Indonesia) dan Local Autonomy Act (Korea Selatan) ..	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu. "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): 83. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.
- Achmad Musyahid Idrus. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih "Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah". *Ad-Daulah* 10, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Adjie Hendrawan and Tengku Erwinsyahbana. "Studi Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Demokrasi Dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Buletin Konstitusi* 1, no. 1 (2020). <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4947>.
- "Al-Qur'an," n.d., v. Al-Ma'idah: 44.
- "Al-Qur'an," n.d., v. Al-Ahzab: 36.
- "Al-Qur'an," n.d., v. al-An'am: 57.
- Anugrahdwi. "Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya," September 12, 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>.
- Bachri, Chaidir, A Muin Fahmal, and Ahmad Fadil. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.361>.
- C.S.T. Kansil. *Hukum Antar Tata Pemerintahan (Comprative Goverment)*. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Dirja, Irandi Paradizsa. "Kendala Dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang- Undang Terkait Dengan Otonomi Daerah," 2021.
- Elcaputera, Arie. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 28, 2022): 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik" 16, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Fikriana, Askana, and Jihadi Akbar Yusuf. "Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2023). <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui>.

- Gusman, Delfina. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif." *UNES Law Review* 5, no. 3 (March 8, 2023): 847–62. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425>.
- Handini, Wulan Pri. "Problematisasi Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (July 30, 2019): 117–49. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.95>.
- Handoyo, Budi. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 2 (December 11, 2021): 94–110. <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i2.458>.
- Hasan Husaini, Mariani, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin. "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 1, 2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 2 (December 1, 2021): 213–30. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754>.
- Imam Ropii. "Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah (Konsepsi dan Dinamikanya)." *Maksigama* 9, no. 1 (November 9, 2015): 34–51. <https://doi.org/10.37303/.v9i1.4>.
- Indaryanto, Wisnu. "Interpretasi Mengenai Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Wicarana* 1, no. 1 (March 29, 2022): 29–46. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.3>.
- Indrayani, Rudi; Fajar Sudewo and Achmad Hamzani. "Limitations for Formulation of Criminal Provisions in Regional Regulations." In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia*. Tegal, Indonesia: EAI, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320535>.
- Inggit Ar, Andi Bau. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (May 30, 2019): 1–13. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. 1st ed. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/8069/7/KONTEKSTUALISASI%20DOKTRI%20POLITIK%20ISLAM%20DALAM%20FIQH%20SIYASAH.pdf>.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Kabupaten Magelang. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/282545/perda-kab-magelang-no-3-tahun-2024>.

Kabupaten Mojokerto. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (2020). <https://jdih.mojokertokab.go.id/pencarian/140/detail>.

— — —. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 3 Tahun 2020 tentang Kawasan tanpa rokok (2020). <https://jdih.mojokertokab.go.id/pencarian/142/detail>.

Kota Kediri. Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (2020). https://jdih.kedirikota.go.id/read/file/produk_hukum/1292/Penanggulangannya%20Tuberkulosis%20Dan%20Human%20Immunodeficiency%20VirusAcquired%20ImmunodeficiencySyndrome.

Kota Makassar. Peraturan Daerah Kota Makassar No 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat (2021). <https://jdih.makassarkota.go.id/dokumen/detail/peraturan-daerah-kota-7-2021>.

Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedarang Kaki Lima Di Kota Medan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241982/perda-kota-medan-no-5-tahun-2022>.

Kota Mojokerto. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 10 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrom (2016). <https://jdih.mojokertokota.go.id/Website/DaftarProkumWebsite/detail?id=6223>.

— — —. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (2018). <https://jdih.mojokertokota.go.id/Website/DaftarProkumWebsite/detail?id=6149>.

Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2019). https://jdih.jogjakota.go.id/home/produk_hukum/detail/2425?view=.

- Kwak and Hyon Kun. "Local Administrative System Transformation and Neighborhood Governance in South Korea." *Local Government Studies* 224, no. 4 (2012). <https://doi.org/G704-000335.2012.24.4.005>.
- La Samsu. "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyah," no. 1 (2017).
- Lutfil Ansori. *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. 1st ed. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020.
- Made Dhana Pranata and Nyoman Mas Aryani. "Problematisasi Hukum Tentang Executive Review di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p06>.
- Maha Shania Tara Gusmoi, Siti Soleha, Gina Mardiana, and Regi Refian Garis. "Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah." *Public Sphere Review*, September 25, 2023, 62–73. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.88>.
- Marten Bunga. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 27, 2020): 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.
- Marwan, Ali. "Pemuaian Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Eksekusi* 3, no. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i1.11954>.
- Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 3 (2023). <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>.
- Muhiddin, Amir. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (April 14, 2013). <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>.
- Mukhsin Nyak Umar. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. 2nd ed. Aceh: Yayasan WDCBanda Aceh, 2017.
- Mukhtasar Syamsuddin, Yang Seung Yoon, Mohtar Mas'ood, Kihl Young Whan, Shin Doh Chull, Tulus Warsito, Lim Kim-Hui, and Park Jae Bong. *Politik dan Pemerintahan Korea*. 1st ed. Yogyakarta: INAKOS (The International Association of Korean Studies in Indonesia) dan Pusat Studi Bahasa Korea Universitas Gadjah Mada), 2010.
- Nadirsah Hawari. "As-Sulthah At-Tasyri'iyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'iy." *Jurnal TAPIS* 7, no. 12 (2011). <https://dx.doi.org/10.24042/tps.v7i1.1530>.
- Nany Suryawati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi." In *Proceedings of Symposium Nasional & Call of Paper*, Vol. 1. Fakultas Hukum Universitas

Kanjuruhan Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2018.

Nazar Bakry. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Nggilu, Novendri Mohamad. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (September 22, 2020). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.150>.

Nur Wijayanti, Septi. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.

Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 17, 2020): 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.

Palit, Refelino. "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah." *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/17320>.

Praptanugraha. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (2008). <https://media.neliti.com/media/publications/84284-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan.pdf>.

Rafi Fahlawan. "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27110/>.

Rohayana, Ade Dedi. "Kaidah-Kaidah Fiqh (The Maxims Of Islamic Law): Fondasi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer". Fakultas Syariah IAIN Pekalongan (2019), <http://repository.uingusdur.ac.id/216/>.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021. accessed 1 November, 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>.

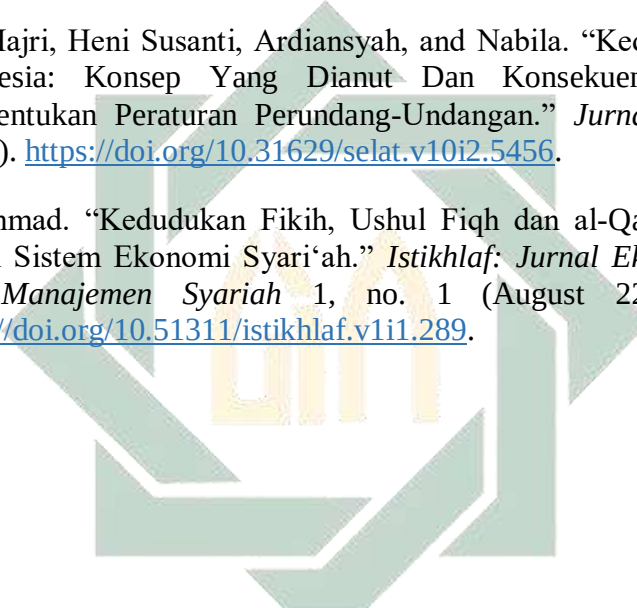
Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, accessed July 15, 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Republik Indonesia, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011. accessed Juli 15, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023, accessed Desember 6, 2024, <https://peraturan.go.id/uu-no-6-tahun-2023>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2022, accessed October 21, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun%202022>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014, accessed Juni 30, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Republik Korea Selatan. Act No. 19241 tentang Local Autonomy Act (2023). https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=62494&lang=ENG.
- Simatupang, Taufik H. "Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (June 26, 2019): 217. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>.
- Dhea Desi Ananda. "Analisis Siyasah Tasyri'iyah Tentang Rencana Undang-Undang Minuman Beralkohol Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol". Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2022. accessed Agustus 29, 2024, <https://repository.radenintan.ac.id/19612/>.
- Sugeng Santoso. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi." *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p1-18>.
- Suhariyono Ar. "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Perspektif* 17, no. 1 (January 27, 2012): 20. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.
- Suharyo. "Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (December 31, 2015): 431. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.
- Sulaiman, King. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (January 23, 2019): 167. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.167>.
- Sulistiyani, Anik. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan". Skripsi Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2017), 31 accessed October 15, 2024, <https://repositori.unimma.ac.id/1063/>.
- Sunarno Danusastro. "Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (n.d.). <https://doi.org/10.31078/jk943>.

- Susanti, Tria Ima. "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie* 1, no. 2 (December 14, 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.
- Titik Triwulan T and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.
- Wahyu Fitriyani. "Konsep Kedaulatan Ibnu Khaldun Dalam Kitab Mukaddimah Dan Relevansinya Dengan Sistem Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." Skripsi, Iain Salatiga, 2022. accessed January 9, 2025. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13050>.
- Wira Atma Hajri, Heni Susanti, Ardiansyah, and Nabila. "Kedaulatan Rakyat Di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya Di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Selat* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5456>.
- Zaki, Muhammad. "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah." *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 1, no. 1 (August 22, 2021): 32–47. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A